



2019 | **REVISI PERJANJIAN KINERJA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 merupakan pernyataan revisi perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Revisi Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2019 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2019.

Revisi Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784



REVISI PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.**

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2019**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SS1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional Dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IKP 1a Rasio Konektivitas Antar Wilayah	rasio	0,78
2	SS2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKP 2a Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP	%	19,12
		IKP 2b Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat	%	1,28
		IKP 2c Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	21,27
3	SS3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKP 3a Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat	%	18,29
		IKP 3b Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat	%	19,83
		IKP 3c Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solarcell	%	40,81
		IKP 3d Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub-Sektor Transportasi Darat	%	83,22
		IKP 3e Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40
4	SS5 Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49

PROGRAM

ANGGARAN

1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Rp 4.013.014.163.000,00

Jakarta, 17 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Kementerian **Perhubungan**

